

Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto Dengan Pendekatan *Value For Money*

Mulyaningtyas

STIE ASIA Malang

Email : mulyaningtyas.74@gmail.com

Abstract

In applying the central government policy, city of Mojokerto can absorb the budgeted in 2016 up to 91 % from APBD amount Rp 1,007 trillion. Then in periode of 2017 the number decreased became 10% into Rp 915 million. In the realization of budget utilization statement that issued by Income Financial Management dan Assets Institution of Mojokerto government, the deficient of activities implementation make funds realized amount Rp 83.575.497.292 was abortive to utilize. Because of that BPPKA should concern on value for money to implement the activities. This research aims to determine how is financial performance of BPPKA Mojokerto for fiscal period of 2013-2015, by using value for money approach in economy, efficiency, and effectivity's term. This research using descriptive with quantitative approach. This research conducted in Income Financial Management dan Assets Institution of Mojokerto Government. The sources of the data in this research are using literature study method and documentation. The data analysis techniques is quantitative descriptive by formula: economic ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio. Based on the results of the research, it is known that financial performance criteria of BPPKA for fiscal period of 2013 included in quite economical, quite efficient, and very effective. In the fiscal period of 2014 the evaluation of financial performance criteria rating were quite economical, less of efficient, and ineffective. Then in the fiscal period of 2015, the evaluation of financial performance criteria included in quite economical, less of efficient, and very effective.

Keywords : *Value for Money, Economic, Efficiency, Effectiveness*

Abstrak

Kota Mojokerto dalam menerapkan kebijakan pemerintah pusat, dapat menyerap anggaran tahun 2016 menembus angka 91% dari APBD sebesar Rp 1,007 triliun. Tahun 2017 dengan APBD yang turun 10% menjadi Rp 915 miliar. Dalam rincian realisasi penyerapan anggaran yang dikeluarkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, minimnya pelaksanaan kegiatan ini membuat Rp 83.575.497.292 dana teralokasi gagal terserap. Untuk itu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto agar memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada BPPKA Kota Mojokerto tahun anggaran 2013-2015, dengan pendekatan *value for money* yaitu dilihat dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto. Pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Ekonomi, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPPKA Kota Mojokerto pada tahun anggaran 2013 masuk dalam kriteria cukup ekonomis, cukup efisien, dan sangat efektif. Tahun anggaran 2014 kriteria penilaian kinerja keuangannya yaitu cukup ekonomis, kurang efisien, dan tidak efektif. Kemudian tahun anggaran 2015, penilaian kinerja keuangannya masuk dalam kriteria cukup ekonomis, kurang efisien, dan sangat efektif.

Kata Kunci: *Value for Money, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, peran pemerintah sangat penting dalam perkembangan sektor publik mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang mendominasi di negara ini. Sektor publik dapat dipahami sebagai penyedia layanan umum maupun kepentingan publik dengan tujuan tanpa mencari laba (*non profit*) dari pihak pemerintah kepada masyarakat baik berupa barang ataupun jasa. Kini, kinerja instansi pemerintahan menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai kinerja organisasi sektor publik yang tidak efisien, sebagai bentuk pemborosan, sumber kebocoran dana, dan selalu merugikan institusi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut agar pemerintah dikelola secara profesional dan dilakukannya suatu transparansi serta akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menggunakan dana yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sehingga dilakukan pertanggungjawaban pada masyarakat, maka konsep pengukuran kinerja juga perlu dilakukan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam pengukuran suatu kinerja, antara lain dengan menggunakan metode *balance score card* dimana terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*finansial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis/intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*growth and learn*). Selain itu dengan menggunakan metode *value for money*, terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *ouput* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *ouput*, dan *outcome* secara bersama-sama.

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun Provinsi. Penyerapan anggaran tahun 2016 menembus angka 91% dari APBD sebesar Rp 1,007 triliun. Naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 85%. Tahun 2017 dengan APBD yang turun 10% menjadi Rp 915 miliar. Wali Kota Mojokerto berharap serapan anggaran tahun 2017 bisa sampai 95%. Data yang dihimpun, realisasi penyerapan APBD 2016, dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum maksimal. *Mapping* anggaran tahun lalu yakni sebesar Rp 1.018.342.017.074 hanya terealisasi Rp 934.766.519.782 atau 91,7%. Dalam rincian realisasi penyerapan anggaran yang dikeluarkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto sempat menyebutkan, minimnya pelaksanaan kegiatan ini membuat Rp 83.575.497.292 dana teralokasi gagal terserap. Kepala BPPKA Kota Mojokerto, Agung Moeljono menegaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan mulai 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi anggaran mencapai 91,7%.

Untuk itu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto diharapkan agar memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, dimana konsep pengelolaan ini berdasarkan pada tiga elemen utama yang terdapat di dalamnya yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Analisis kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto merupakan proses penilaian mengenai tingkat kemajuan dalam pencapaian suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPPKA Kota Mojokerto dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto dengan Pendekatan *Value for Money*”.

KAJIAN LITERATUR

1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
1.	Okky Irvina Kristanti (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan <i>Value For Money</i> (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karimunjawa).	Hasil penelitian menunjukkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler Guru Kecamatan Karimunjawa masuk dalam kategori ekonomis, sangat efisien, dan cukup efektif. Pada Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dengan kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SD dan SDLB Negeri masukkan dalam kategori sangat ekonomis, sangat efisien, dan cukup efektif.
2.	Isna Ardila (2015)		Hasil penelitian menunjukan kurang ekonomis dan tidak efisien, namun rasio efektivitas menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah efektif dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan pelayanan agar efektivitas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tercapai lebih baik lagi.
3.	Mega Oktavia Ropa (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik.
4.	Nindy Cahya Feriska Sari (2015)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip <i>Value For Money</i> (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik.

Sumber: Data Diolah, 2017

2. Landasan Teori

2.1 Analisis

Analisis menurut Darminto dan Rifka Julianty (2002: 52) adalah sebagai berikut:

“Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

2.2 Kinerja

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab I, Pasal 1:37) menyebutkan pengertian kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pendapat Bastian (2006: 274), “kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan penilaian atas keberhasilan dalam suatu pencapaian dari target atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Secara umum, apabila kinerja tiap individu diberi penghargaan, maka memungkinkan kinerja tersebut untuk diberi penghargaan tinggi, sehingga dalam hal ini akan memicu tingginya usaha dari tiap individu tersebut untuk menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya, jika kinerja tiap individu tidak diberi penghargaan, maka memungkinkan kinerja tersebut diberi penghargaan rendah, dan menyebabkan rendahnya usaha dari tiap individu tersebut dalam menghasilkan kinerja.

2.3 Indikator Kinerja

Menurut Bastian (2006: 267), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Bastian menjelaskan:

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.4 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan (Wikipedia, 27 Maret 2017).

2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986: 199).

2.6 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121):

- a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

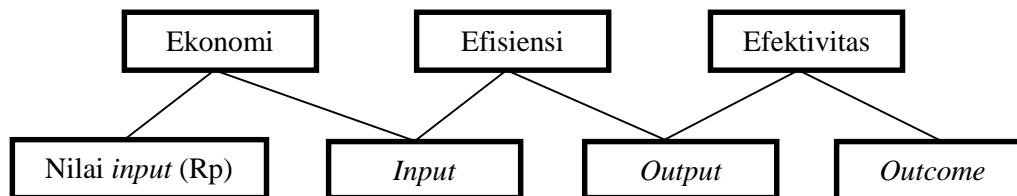
2.7 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :
 - a. Pendapatan
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas dengan selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset *non*-keuangan, pembiayaan, dan *non*-anggaran (SAP, 2005).
4. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.8 Value For Money

Value for Money menurut Mardiasmo (2002: 4), merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Secara skematis, *value for money* digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Mardiasmo

Gambar 1. Konsep *Value For Money*

2.9 Indikator Kinerja Dalam *Value For Money*

Mardiasmo (2009) juga membagi indikator *value for money* menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
 Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)
 Efektivitas artinya kontrobusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

2.10 Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money*

Langkah-langkah pengukuran *value for money* diantaranya yaitu:

1. Pengukuran ekonomi
 Menurut Mardiasmo (2002: 133), pada pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi ini merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah:
 - a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
 - b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
 - c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?
2. Pengukuran efisiensi
 Mardiasmo (2002: 133-134) menyatakan bahwa, efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money* yang diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

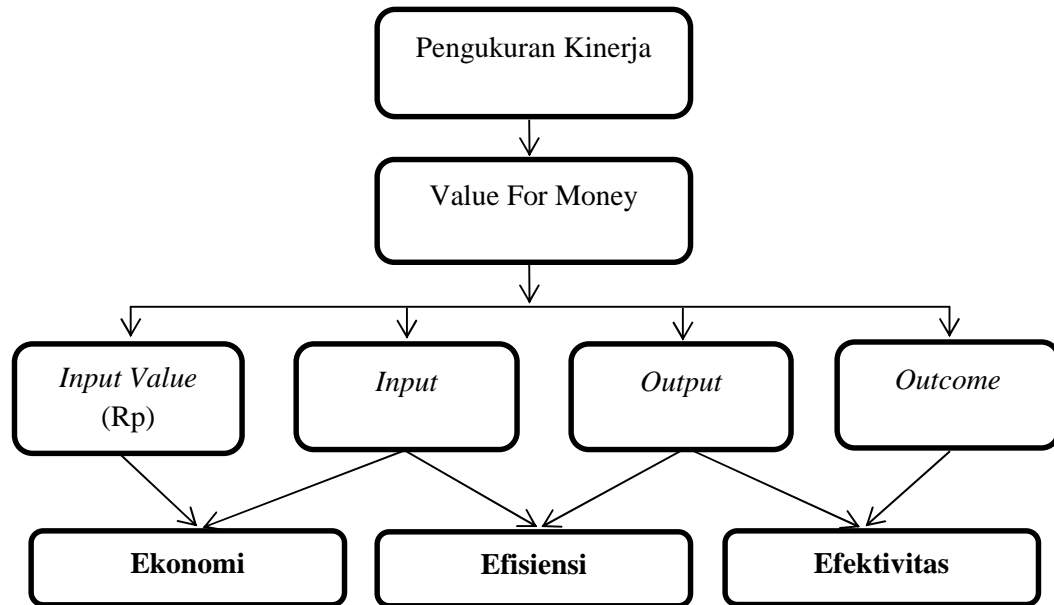
3. Pengukuran efektivitas
 Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002: 134).
4. Pengukuran *outcome*
Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari pada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan (Smith, 1996). Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif yang terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif yang terkait dengan perencanaan kinerja masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002: 134-135).

3. Kerangka Penelitian

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran, di dalam suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja keuangan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. *Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penjelasan dari masing-masing elemen sebagai berikut:

1. Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (*input*) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisien merupakan perbandingan *output* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa ketiga pokok bahasan dalam *value for money* saling berkaitan. Ekonomi membahas mengenai masukan (*input*), efisien membahas masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Oleh karena itu untuk mengukur seberapa ekonomis, efisien, dan efektifnya kinerja keuangan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dengan menggunakan pendekatan *value for money*, yang dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto yang terletak di Jalan Letkol Sumardjo No. 62 Kota Mojokerto.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang termuat dalam APBD dan Laporan Realisasi APBD tahun 2013 – 2015.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa data APBD dan Laporan Realisasi APBD Kota Mojokerto yang diperoleh dan dikumpulkan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, jurnal, dan *website* yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Dokumentasi yaitu dengan melakukan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto berupa gambaran umum, struktur organisasi beserta tugas dan fungsi pokok pada masing-masing

kedudukan, kepegawaian, serta pengambilan data pada bagian akuntansi secara langsung berupa APBD dan Laporan Realisasi APBD periode tahun 2013 – 2015.

4. Definisi Operasional

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kota Mojokerto dengan pendekatan *value for money* yang melalui 3 rasio sebagai berikut:

1. **Ekonomi**
 Ekonomi adalah hubungan antar pasar dan *input*. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan *input* (anggaran pengeluaran) yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. **Efisiensi**
 Efisiensi adalah hubungan antara *input* (besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan) dan *output* (realisasi pendapatan yang diterima). Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya berarti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefit and minimizing costs*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).
3. **Efektivitas**
 Efektivitas adalah hubungan antara *output* (berupa target yang ditetapkan) dan *outcome* (dampak terhadap realisasi pendapatan asli daerahnya) atau tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk menilai kinerja BPPKA Kota Mojokerto berdasarkan *value for money* yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002: 4) :

1. **Rasio Ekonomi**
 Rasio ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dimana rasio ekonomi merupakan perbandingan antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan. Rasio ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi Belanja BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 – 2015

Input Value : Anggaran Belanja BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 –2015

Ketentuan:

Tabel 2. Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan

Rasio Ekonomi	Kriteria Ekonomi
100% - keatas	Sangat ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup ekonomis
60% - 80%	Kurang ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996

2. **Rasio Efisiensi**

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Realisasi Biaya BPPKA Kota Mojokerto untuk memperoleh Pendapatan dari Pemda tahun 2013 – 2015

Input : Realisasi Pendapatan yang diterima BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 – 2015

Ketentuan:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% - keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan atau target tersebut. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Realisasi Pendapatan Asli Daerah BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 – 2015

Output : Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 – 2015

Ketentuan :

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
100% - keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum BPPKA Kota Mojokerto

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka di daerah-daerah harus dibuat kebijakan atau aturan tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan ini dibuat guna memberikan pedoman yang menyeluruh dalam penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tanggal 11 April 2008, tentang Organisasi dinas-dinas Kota Mojokerto, dimana salah satu dinas yang dibentuk adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto merupakan gabungan dari Bagian Keuangan

Sekretaris Daerah dan Dinas Pendapatan. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto merupakan salah satu lembaga teknis pada Pemerintah Kota Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Letkol Sumardjo No. 62 Kota Mojokerto, telepon (0321-395945), dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Daerah, Pendapatan dan Investasi Daerah, Dana Perimbangan serta Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Namun dengan adanya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, maka berubah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

2. Analisis Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi kinerja keuangan BPPKA Kota Mojokerto periode tahun 2013 –2015 adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input (A) : Realisasi Belanja BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 – 2015

Input Value (B) : Anggaran Belanja BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 – 2015

Tabel 5. Rasio Ekonomi Kinerja Keuangan BPPKA Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2013 - 2015

Tahun	Realisasi Belanja (Rp) A	Anggaran Belanja (Rp) B	Rasio Ekonomi (%) A/B x 100	Kriteria
2013	511.091.545.446,13	626.651.257.225,59	81,56	Cukup Ekonomis
2014	631.527.309.437,86	734.298.241.776,93	86	Cukup Ekonomis
2015	706.327.513.032,70	870.441.121.703,87	81,15	Cukup Ekonomis

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2015, Data Diolah

Pada tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan penilaian kinerja BPPKA Kota Mojokerto berdasarkan rasio ekonomi tahun anggaran 2013 - 2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 kinerja BPPKA Kota Mojokerto telah memenuhi kriteria cukup ekonomis karena berada di kisaran antara 80%-90% yaitu sebesar 81,56%. Pada tahun 2014 kinerja BPPKA Kota Mojokerto mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Hal ini terlihat dari persentase rasio ekonomi di tahun 2014 yaitu sebesar 86%, namun masih berada di rasio cukup ekonomis di kisaran 80%-90%. Sedangkan di tahun 2015 kinerja BPPKA Kota Mojokerto justru mengalami penurunan. Terlihat pada persentasenya senilai 81,15%. Angka yang sedikit lebih besar penurunannya dibanding dengan peningkatan tahun lalu, sehingga masuk dalam kriteria cukup ekonomis.

3. Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi kinerja keuangan pada BPPKA Kota Mojokerto periode tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output(A) : Realisasi Belanja/Biaya BPPKA Kota Mojokerto untuk memperoleh Pendapatan dari Pemda tahun 2013 - 2015

Input(B) : Realisasi Pendapatan yang diterima BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 – 2015

Tabel 6. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan BPPKA Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2013 – 2015

Tahun	Realisasi Belanja (Rp) A	Realisasi Pendapatan (Rp) B	Rasio Efisiensi (%) A/B x 100	Kriteria
2013	511.091.545.446,13	568.900.569.597,47	89,84%	Cukup Efisien
2014	631.527.309.437,86	689.559.351.472,80	91,58%	Kurang Efisien
2015	706.327.513.032,70	717.544.079.472,41	98,44%	Kurang Efisien

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2015, Data Diolah

Berdasarkan tabel 6 tahun anggaran 2013 hasil perhitungan penilaian kinerja BPPKA Kota Mojokerto berdasarkan rasio efisiensi termasuk dalam kriteria yang cukup efisien, karena berada di kisaran 80%-90% yaitu sebesar 89,84%. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 91,58% yang menyebabkan kinerja BPPKA Kota Mojokerto menjadi kurang efisien dalam mengelola keuangannya. Kemudian di tahun anggaran 2015 semakin meningkat persentasenya sebesar 98,44% yang dapat dinilai bahwa kinerja BPPKA Kota Mojokerto menjadi kurang efisien, karena berada di antara 90%-100%.

4. Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas BPPKA Kota Mojokerto periode tahun 2013 – 2015 adalah sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome(A) : Realisasi Pendapatan Asli Daerah BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 - 2015

Output(B) : Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah BPPKA Kota Mojokerto tahun 2013 – 2015

Tabel 7. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan BPPKA Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2013 - 2015

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) A	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp) B	Rasio Efektivitas (%) A/B x 100	Kriteria
2013	74.944.029.536,47	68.400.631.550,00	109,57%	Sangat Efektif
2014	25.092.877.550,28	82.387.572.450,00	30,46%	Tidak Efektif
2015	129.258.132.763,41	117.157.806.747,00	110,33%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKA Kota Mojokerto Tahun 2013-2015, Data Diolah

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa kinerja BPPKA Kota Mojokerto berdasarkan rasio efektivitas pada tahun anggaran 2013 termasuk dalam kategori sangat efektif, karena persentasenya di atas 100% yaitu sebesar 109,57%. Akan tetapi pada tahun anggaran 2014 persentase rasio efektivitas penilaian kinerja BPPKAKota Mojokerto menurun drastis dari tahun sebelumnya yaitu hanya mampu mencapai persentase senilai 30,46% dan termasuk dalam kriteria yang tidak efektif, karena kurang dari 60%. Kemudian pada tahun anggaran 2015 tingkat efektivitas kinerja BPPKAKota Mojokerto berdasarkan rasio efektivitasnya mengalami kenaikan yang cukup drastis pula dengan persentase sebesar 110,33%. Sehingga kinerja BPPKA Kota Mojokerto dinilai sangat efektif, karena perolehannya melebihi 100%.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan value for money maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian mengenai kinerja BPPKA Kota Mojokerto dari segi ekonomi diketahui:
 - a. BPPKA Kota Mojokerto periode tahun anggaran 2013 telah menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cukup ekonomis.
 - b. BPPKA Kota Mojokerto periode tahun anggaran 2014 dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sudah cukup ekonomis.
 - c. BPPKAKota Mojokerto periode tahun anggaran 2015 dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sudah cukup ekonomis.
2. Hasil penelitian mengenai kinerja BPPKAKota Mojokerto dari segi efisiensi diketahui:
 - a. BPPKAKota Mojokerto periode tahun anggaran 2013 dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sudah cukup efisien.
 - b. BPPKAKota Mojokerto periode tahun anggaran 2014 dalam menjalankan kegiatan operasionalnya kurang efisien.
 - c. BPPKAKota Mojokerto periode tahun anggaran 2015 dalam menjalankan kegiatan operasionalnya kurang efisien.
3. Hasil penelitian mengenai kinerja Badan Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dari segi efektivitas diketahui:
 - a. BPPKAKota Mojokerto periode tahun anggaran 2013 dalam merealisasikan PAD dengan sangat efektif.
 - b. BPPKAKota Mojokerto periode tahun anggaran 2014 dalam merealisasikan PAD secara tidak efektif.
 - c. BPPKAKota Mojokerto periode tahun anggaran 2015 dalam merealisasikan PAD dengan sangat efektif.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto
 - a. BPPKA Kota Mojokerto diharapkan lebih menghemat lagi dalam pengeluaran biaya, agar tingkat ekonomis mengalami kenaikan.
 - b. BPPKA Kota Mojokerto diharapkan untuk tahun selanjutnya mampu meningkatkan kinerjanya dari segi efisiensi karena dari analisis yang telah dilakukan, kinerja BPPKA Kota Mojokerto semakin menurun dari periode tahun anggaran 2013 – 2015.
 - c. BPPKA Kota Mojokerto diharapkan mampu mempertahankan kinerjanya dari segi efektivitas untuk tahun selanjutnya, karena dari analisis yang telah dilakukan pada awal dan akhir tahun selama periode 3 tahun anggaran yaitu pada tahun 2013 dan 2015 sudah sangat efektif. Kemudian lebih mengantisipasi agar tingkat efektivitasnya tidak mengalami penurunan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam penentuan *outcome* dapat menggunakan metode lain, misalkan menyebar angket kepada masyarakat agar diketahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu organisasi sehingga nilai *outcome* lebih riil.
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam mengukur kinerja suatu organisasi tidak hanya menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas saja. Tetapi perlu ditambah dengan dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, Isna. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan *Value For Money* Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Volume: 15 No: 1 hal: 78-85. [Http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/428](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/428), diakses 27 Maret 2017.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka, Julianty. (2002). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Manfaat*. Yogyakarta: AMD-YKPN.
- [Http://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20160922152949.Permendagri-13 2006.pdf](http://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20160922152949.Permendagri-13%202006.pdf). Definisi Kinerja, diakses 27 Maret 2017.
- [Https://www.harianbuana.com](https://www.harianbuana.com). Serapan Anggaran Kota Mojokerto, diakses 27 Maret 2017.
- [Https://id.m.wikipedia.org/wiki/kinerja](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kinerja). Definisi Kinerja, diakses 27 Maret 2017.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri, No. 600.900.327 Tahun 1996.
- Kristanti, Okky Irvina. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money*, Skripsi Program Sarjana Ekonomi Akuntansi. Program Sarjana Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. [Http://jurnal.usd.ac.id](http://jurnal.usd.ac.id), diakses 27 Maret 2017.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: BPFE.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Ropa, Mega Oktavia. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Volume: 4 No: 2 hal: 738-747. [Http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13153](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13153), diakses 27 Maret 2017.
- Sary, Nindy Cahya Feriska. (2016). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Ekonomi*. [Http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view](http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view), diakses 27 Maret 2017.

Syamsi, Ibnu. (1986). Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional. Jakarta: CV Rajawali.

[Www.mojokertokota.go.id](http://www.mojokertokota.go.id). Profil BPPKA Kota Mojokerto, diakses 27 Maret 2017.